

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

## EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PP NO. 71 TAHUN 2010 DALAM LAPORAN KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN BERAU

**FITRIAH**

[stiem.fitriah@gmail.com](mailto:stiem.fitriah@gmail.com)

**WINDA JUBAIDAH**

[winda.jubaidah6@gmail.com](mailto:winda.jubaidah6@gmail.com)

**Universitas Muhammadiyah Berau**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penyajian laporan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. Lokasi penelitian difokuskan pada instansi DLHK Kabupaten Berau. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa penyusunan laporan keuangan oleh DLHK belum sepenuhnya mengacu pada SAP berbasis akrual sebagaimana yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini disebabkan DLHK masih menggunakan acuan SAP lama berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005, yang hanya mencakup penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara itu, dua komponen penting yang seharusnya disajikan dalam sistem akrual, yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan Arus Kas, belum disusun oleh DLHK. Adapun kendala utama yang dihadapi dalam implementasi SAP berbasis akrual adalah adanya kesalahan dalam proses penganggaran serta penginputan data ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang berdampak pada ketidaklengkapan penyajian laporan keuangan instansi tersebut.

**Kata Kunci:** Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Laporan Keuangan, DLHK Kabupaten Berau.

### ABSTRACT

*This study aims to evaluate the compliance of financial statement presentation at the Environmental and Sanitation Agency (DLHK) of Berau Regency with the Accrual-Based Government Accounting Standards (SAP) as stipulated in*

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

*Government Regulation No. 71 of 2010. The research was conducted at the DLHK office of Berau Regency. The findings reveal that the financial reports prepared by DLHK are not yet fully aligned with the accrual-based SAP outlined in PP No. 71 of 2010. This discrepancy is due to the continued use of the previous standard, PP No. 24 of 2005, which only includes the presentation of the Budget Realization Report (LRA), Operational Report (LO), Statement of Changes in Equity, Balance Sheet, and Notes to the Financial Statements (CaLK). Meanwhile, two critical components required under the accrual basis namely the Statement of Changes in Budget Surplus (SAL) and the Cash Flow Statement are not presented. The main challenges faced by DLHK in implementing accrual-based SAP include errors in budgeting and data entry into the Regional Government Information System (SIPD), which result in incomplete financial reporting.*

**Keywords:** *Accrual-Based Government Accounting Standards, Financial Statements, Environmental and Sanitation Agency (DLHK), Berau Regency.*

## PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah seperangkat prinsip dan metode akuntansi yang secara yuridis wajib dijadikan rujukan oleh entitas pemerintah ketika menyusun serta menyajikan laporan keuangan. Keberadaan SAP, yang mula-mula diundangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berfungsi meningkatkan mutu keterbandingan, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia. Regulasi ini mengatur bentuk, isi, dan tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban APBN maupun APBD sehingga selaras dengan tuntutan good governance dan pengawasan publik.

Sejalan dengan dinamika tata kelola keuangan negara, pemerintah kemudian menerbitkan PP No. 71 Tahun 2010 yang secara tegas mengalihkan basis pencatatan dari “kas menuju akrual” menjadi akrual penuh. Regulasi pengganti tersebut memberikan dasar hukum baru sekaligus tenggat waktu penerapan bagi seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem akrual, setiap transaksi ekonomi diakui pada saat hak dan kewajiban timbul, terlepas dari kapan kas berpindah tangan; pendekatan ini diharapkan memperlihatkan posisi keuangan pemerintah yang lebih realistis, memudahkan analisis kinerja, serta memperkuat disiplin fiskal jangka panjang.

Transformasi ke basis akrual membawa implikasi praktis: pemerintah daerah diwajibkan menyusun tujuh elemen laporan keuangan, seperti

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perluasan struktur ini menuntut kapabilitas SDM akuntansi, pembaruan sistem informasi, hingga penyesuaian proses penganggaran agar informasi keuangan dapat dihasilkan secara tepat waktu, andal, dan sesuai standar.

Pada tataran daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Berau No. 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, memiliki mandat membantu Bupati dalam urusan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk pengelolaan kebersihan. Fungsi strategis tersebut meniscayakan pengelolaan sumber daya keuangan yang akuntabel, sebab program-program DLHK, mulai dari pengendalian pencemaran hingga pengelolaan sampah yang bersentuhan langsung dengan layanan publik dan keberlanjutan lingkungan.

Mengingat tuntutan akrual dan posisi DLHK sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola belanja sektor lingkungan, penting untuk menelaah sejauh mana laporan keuangan DLHK telah disajikan sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Kajian ini tidak hanya bermanfaat bagi DLHK dalam memperbaiki praktik pelaporan, tetapi juga menjadi referensi bagi OPD lain di

Kabupaten Berau untuk memperkuat kesiapan implementasi SAP berbasis akrual secara menyeluruh.

## KAJIAN TEORI

### 1. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan cabang dari akuntansi yang secara khusus menangani pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan dalam lingkup organisasi sektor publik, khususnya pemerintah pusat maupun daerah. Akuntansi ini tidak hanya berorientasi pada aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas terhadap penggunaan dana publik. Lingkupnya mencakup keseluruhan proses mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan lembaga pengawasan.

Menurut Mentu dan Sondakh (2016), akuntansi pemerintahan memiliki peran utama dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi utamanya adalah menyajikan laporan yang mendukung proses administratif pemerintahan serta membantu manajemen dalam mengontrol dan mengevaluasi pengeluaran berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, akuntansi pemerintahan bukan hanya alat pencatatan, melainkan juga instrumen

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

pengawasan dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada efisiensi serta efektivitas penggunaan sumber daya publik.

Selain itu, akuntansi pemerintahan juga menjadi dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Laporan-laporan tersebut disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan keterbandingan dan keseragaman informasi di seluruh entitas pemerintahan. Hal ini penting guna mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan profesional, sejalan dengan prinsip good governance dan tuntutan reformasi birokrasi di sektor publik.

## 2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan seperangkat prinsip dan pedoman baku yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan oleh entitas pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan utama diberlakukannya standar ini adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal oleh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pengawas, masyarakat, serta pihak legislatif. Menurut Yoyo Sudiaryo dan rekan-rekan (2017:271), keberadaan SAP

memberikan kerangka sistematis agar pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta publik.

Hoesada dan Hendra (2015:15) menyatakan bahwa entitas pelaporan dalam SAP mencakup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Artinya, seluruh lembaga eksekutif yang mengelola dana publik wajib menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan standar ini. SAP tidak hanya berlaku sebagai pedoman teknis akuntansi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membentuk budaya tata kelola keuangan yang profesional di sektor publik.

Lebih lanjut, Rusmana dan kolega (2017:33) menjelaskan bahwa SAP terdiri dari konsep dasar, ketentuan normatif, prosedur teknis, metode pencatatan, serta teknik analisis laporan keuangan yang telah diseleksi dan ditetapkan oleh otoritas resmi penyusun standar, dalam hal ini adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Standar ini bersumber dari praktik akuntansi terbaik baik secara nasional maupun internasional dan telah mengalami adaptasi agar sesuai dengan karakteristik pengelolaan keuangan di sektor publik Indonesia. SAP digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, meringkas, menyesuaikan, serta menyajikan transaksi keuangan pemerintah agar tercipta sistem informasi akuntansi yang andal, relevan, dan dapat dijadikan dasar dalam proses

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan fiskal pemerintah.

### 3. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual merupakan suatu sistem pelaporan keuangan sektor publik yang mengakui seluruh transaksi ekonomi pada saat kejadian, bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Pendekatan ini memungkinkan entitas pemerintah untuk mencatat pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas secara lebih komprehensif dan tepat waktu dalam laporan keuangan. Menurut Langelo dan rekan-rekannya (2015), SAP berbasis akrual memberikan kerangka pelaporan yang lebih menyeluruh, karena tidak hanya mencatat arus kas, tetapi juga mencerminkan hak dan kewajiban yang muncul dalam setiap transaksi, sehingga gambaran posisi keuangan pemerintah menjadi lebih akurat dan informatif.

Selain itu, meskipun pelaporan keuangan menggunakan basis akrual, pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran tetap didasarkan pada basis kas yang diatur dalam dokumen resmi seperti APBN dan APBD. Artinya, dalam praktiknya pemerintah menggunakan sistem double track, yaitu basis kas untuk pelaksanaan anggaran dan basis akrual untuk pelaporan keuangan. Pendekatan ini bertujuan menjaga konsistensi antara perencanaan fiskal dan pelaporan akuntansi, serta menjawab tuntutan

transparansi dan akuntabilitas publik secara lebih kuat.

Penerapan SAP berbasis akrual tidak hanya menuntut perubahan teknis dalam proses akuntansi, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan sistem informasi keuangan, serta kesadaran institusional terhadap pentingnya pelaporan keuangan yang berbasis hak dan kewajiban akrual. Oleh karena itu, implementasi sistem ini di lingkungan pemerintahan daerah menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan strategis dan berkelanjutan, baik dalam bentuk pelatihan, regulasi pendukung, maupun pengawasan yang terintegrasi.

### 4. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan merupakan tahapan akhir dari proses akuntansi yang bertujuan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Menurut Haryadi (2019), penyajian laporan keuangan adalah proses menyusun dan mengatur data keuangan yang telah diolah melalui sistem akuntansi menjadi bentuk laporan yang sistematis, terstruktur, serta mudah dipahami. Penyajian ini tidak hanya menyangkut tampilan angka, tetapi juga mencakup penjelasan naratif dan pengungkapan tambahan yang diperlukan agar informasi yang disampaikan dapat diinterpretasikan secara tepat oleh para pengguna laporan, seperti manajemen, legislatif, auditor, dan masyarakat.

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Senada dengan itu, Meutia (2018) menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan adalah upaya untuk mengorganisasi data keuangan secara logis ke dalam format yang dapat dipahami serta memberikan manfaat nyata bagi penggunanya. Informasi yang disusun dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar mampu mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

Dalam konteks pemerintahan, penyajian laporan keuangan memiliki fungsi strategis sebagai bentuk akuntabilitas publik atas pengelolaan dana negara. Laporan-laporan tersebut, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan lainnya, harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan agar dapat dibandingkan antar periode dan antar entitas. Oleh karena itu, penyajian yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketepatan teknis, tetapi juga oleh pemahaman terhadap prinsip-prinsip pelaporan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tuntutan transparansi publik.

## METODOLOGI PENELITIAN

Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini dijelaskan untuk memperjelas ruang lingkup konsep yang digunakan serta sebagai dasar dalam melakukan pengukuran secara sistematis.

Pemahaman terhadap definisi operasional sangat penting agar tidak terjadi bias interpretasi dan seluruh proses analisis dapat dilakukan secara objektif dan konsisten.

### a. Standar Akuntansi Pemerintahan

**Berbasis Akrual** merupakan seperangkat prinsip, konsep dasar, dan pedoman teknis akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berdasarkan pendekatan akrual. Dalam sistem ini, transaksi ekonomi dicatat dan diakui pada saat terjadinya, tanpa menunggu arus kas masuk atau keluar. Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik, serta memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai posisi keuangan pemerintah. Dengan dasar ini, pemerintah diharapkan dapat menyediakan informasi keuangan yang lengkap, relevan, dan andal bagi seluruh pemangku kepentingan.

### b. Penyajian Laporan Keuangan

adalah proses akhir dari kegiatan pencatatan akuntansi yang bertujuan menghasilkan laporan keuangan

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

secara terstruktur dan sistematis, sehingga dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Laporan ini disusun untuk mencerminkan kondisi keuangan, kinerja operasional, serta perubahan posisi keuangan entitas dalam periode tertentu. Dalam konteks lembaga publik atau pemerintahan, penyajian laporan keuangan juga mencerminkan karakteristik kualitatif seperti keterandalan, relevansi, kejelasan, serta daya banding antar periode dan antar instansi. Laporan yang disusun dengan baik akan memberikan nilai tambah dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah.

## UNIT ANALISIS, POPULASI, DAN SAMPEL

Penelitian ini menetapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau sebagai unit analisis utama. DLHK berlokasi di Jalan APT. Pranoto No. 10, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan kode pos 77315. Pemilihan instansi ini didasarkan pada perannya sebagai salah

satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola anggaran publik dan diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. DLHK dipilih secara purposif karena merupakan representasi dari lembaga teknis pemerintah daerah yang menjalankan kegiatan operasional dengan dukungan dana publik, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks kesesuaian pelaporan keuangan dengan standar yang berlaku.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh dokumen laporan keuangan yang disusun oleh DLHK Kabupaten Berau. Laporan keuangan yang dimaksud meliputi berbagai komponen penting seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, serta Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun dalam kurun waktu tertentu. Populasi ini digunakan untuk melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual di lingkungan instansi pemerintah daerah.

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari data laporan keuangan DLHK yang relevan dan tersedia selama periode penelitian. Teknik pengambilan

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

sampel dilakukan secara purposif berdasarkan kelengkapan, aksesibilitas, dan keterkaitan data dengan fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji isi dokumen laporan keuangan dan membandingkannya dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara sistematis tingkat kesesuaian antara praktik pelaporan yang dilakukan oleh DLHK dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

## JENIS DAN SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk narasi, dokumen, serta hasil wawancara yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konteks, proses, dan substansi yang diteliti. Data yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau. Laporan ini dianalisis untuk menilai kesesuaiannya

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai DLHK, khususnya yang bertugas di bagian keuangan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait proses penyusunan laporan keuangan, tantangan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, serta pemahaman pegawai terhadap regulasi yang berlaku. Sementara itu, data sekunder mencakup berbagai referensi pendukung yang digunakan untuk memperkuat analisis, seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan pemerintah terkait Standar Akuntansi Pemerintahan, dan dokumen laporan keuangan yang telah dipublikasikan.

Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan valid mengenai implementasi SAP berbasis akrual di lingkungan DLHK Kabupaten Berau.

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam dan relevan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

## METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan tiga metode utama yang saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan terhadap fokus penelitian. Metode-metode tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan secara langsung kepada sejumlah narasumber yang berkompeten, yaitu pegawai pada bagian keuangan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi mengenai proses penyusunan laporan keuangan, penerapan prinsip akuntansi berbasis akrual, serta kendala-kendala teknis dan administratif yang dihadapi dalam implementasinya. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan bantuan alat berupa buku catatan dan perangkat perekam suara

untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan terdokumentasi dengan baik.

### 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat autentik dan faktual, berupa laporan keuangan tahun anggaran 2023 milik DLHK Kabupaten Berau. Dokumen tersebut dianalisis secara langsung oleh peneliti dengan cara membandingkannya terhadap pedoman penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Melalui analisis dokumen, peneliti dapat mengidentifikasi komponen laporan yang disusun, struktur penyajian data, serta kesesuaian informasi yang dilaporkan dengan prinsip akuntansi berbasis akrual.

### 3. Studi Pustaka

Metode studi pustaka dilakukan untuk mendukung kerangka teoritis dan memperkuat analisis hasil penelitian. Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, serta regulasi yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan, khususnya yang berbasis akrual. Studi pustaka ini menjadi landasan penting dalam memahami konsep dasar, standar, serta perkembangan praktik pelaporan keuangan sektor publik, dan sekaligus menjadi rujukan untuk mengkaji temuan lapangan secara lebih mendalam dan terarah.

Dengan menggabungkan ketiga metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang kaya, valid, dan mendukung pencapaian tujuan penelitian secara komprehensif.

## ALAT ANALISIS

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada kerangka Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar ini digunakan untuk menilai sejauh mana penyajian laporan keuangan

pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaporan keuangan sektor publik. SAP berbasis akrual terdiri dari tujuh komponen utama laporan keuangan yang menjadi acuan dalam proses analisis, yaitu sebagai berikut:

### 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan laporan yang menyajikan ringkasan informasi mengenai sumber penerimaan, alokasi, dan penggunaan dana publik yang dikelola oleh entitas pemerintahan. Laporan ini menyandingkan data antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi selama satu periode pelaporan. Tujuan utama LRA adalah memberikan gambaran tentang sejauh mana efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran telah tercapai.

### 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL menyajikan informasi mengenai perubahan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan. Laporan ini menggambarkan apakah terjadi peningkatan atau penurunan sisa anggaran pada akhir

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

tahun. Laporan ini umumnya disusun oleh Bendahara Umum Negara dan oleh entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi, sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan sisa anggaran.

### 3. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan pada suatu tanggal tertentu. Informasi yang disajikan dalam neraca meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan ini memberikan informasi tentang kondisi keuangan entitas dan menjadi dasar bagi evaluasi solvabilitas serta kemampuan jangka panjang entitas pemerintah dalam memenuhi kewajibannya.

### 4. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK menyajikan informasi mengenai aliran masuk dan keluar kas selama satu periode pelaporan. Arus kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menunjukkan sumber, penggunaan, serta perubahan saldo kas dan setara kas. LAK hanya disusun oleh unit organisasi pemerintah yang memiliki

fungsi perbendaharaan secara langsung.

### 5. Laporan Operasional (LO)

LO disusun untuk memberikan informasi mengenai seluruh aktivitas operasional keuangan suatu entitas pemerintah selama periode tertentu. Laporan ini memuat data terkait pendapatan, beban, serta hasil akhir berupa surplus atau defisit operasional. Penyajian LO secara periodik membantu dalam mengevaluasi kinerja entitas dari sisi efisiensi operasional dan penggunaan sumber daya secara aktual.

### 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai perubahan nilai ekuitas suatu entitas pelaporan dari periode sebelumnya ke periode berjalan. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh hasil kegiatan operasional, koreksi kesalahan periode sebelumnya, maupun transaksi lainnya yang mempengaruhi posisi keuangan. Laporan ini membantu dalam memahami dinamika posisi keuangan jangka panjang.

### 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

CaLK merupakan bagian integral dari keseluruhan laporan keuangan yang menyajikan penjelasan rinci, daftar tambahan, serta analisis atas pos-pos yang tercantum dalam keenam laporan utama sebelumnya. Catatan ini memberikan konteks, asumsi, metode akuntansi, serta informasi non-kuantitatif lainnya untuk memperjelas dan memperkaya pemahaman terhadap laporan keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan membantu pengguna laporan memahami kondisi keuangan pemerintah secara utuh.

Dengan menggunakan tujuh komponen ini sebagai alat analisis, peneliti dapat melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh DLHK Kabupaten Berau serta menilai tingkat kepatuhan terhadap SAP berbasis akrual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PEMBAHASAN

Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau

mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Meskipun peraturan ini sebelumnya menjadi acuan utama, namun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang lebih komprehensif. Standar ini mencerminkan pengakuan atas transaksi dan kejadian ekonomi pada saat terjadinya, tidak terbatas pada saat kas diterima atau dibayarkan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun seharusnya memuat tujuh komponen utama sesuai dengan ketentuan SAP berbasis akrual.

Dalam praktiknya, laporan keuangan DLHK Kabupaten Berau untuk tahun anggaran 2023 belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam SAP berbasis akrual. Hasil analisis menunjukkan bahwa instansi ini hanya menyajikan lima dari tujuh komponen laporan keuangan yang diwajibkan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara dua komponen penting lainnya, yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK), belum disusun dan disajikan oleh DLHK dalam laporan keuangannya.

Ketiadaan LPSAL dan LAK dalam laporan keuangan DLHK berdampak pada kurangnya kelengkapan dan akuntabilitas informasi keuangan yang disajikan kepada publik dan pemangku kepentingan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih seharusnya memberikan gambaran tentang sisa anggaran yang dapat digunakan pada periode berikutnya, sedangkan Laporan Arus Kas berfungsi penting dalam menunjukkan pergerakan kas dan setara kas yang terjadi dalam periode pelaporan. Ketidakhadiran dua laporan ini mengindikasikan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan oleh DLHK belum sepenuhnya mengadopsi paradigma akuntansi berbasis akrual yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, evaluasi terhadap kinerja keuangan DLHK dilakukan dengan membandingkan target indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran pada tahun berjalan. Namun

demikian, keberhasilan pencapaian indikator kinerja tidak dapat dinilai secara menyeluruh apabila tidak didukung oleh laporan keuangan yang lengkap dan sesuai standar. Ketidaklengkapan informasi juga menyulitkan dalam melakukan analisis efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di tingkat organisasi perangkat daerah.

Sebagai bagian dari pembahasan ini, disajikan pula tabel perbandingan antara ketentuan ideal dalam SAP berbasis akrual dan kondisi aktual penyajian laporan keuangan oleh DLHK Kabupaten Berau. Tabel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran visual mengenai kesenjangan implementasi yang ada dan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

Berikut adalah tabel perbandingan antara teori Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010 dan praktik penyajian laporan keuangan pada DLHK Kabupaten Berau.

No.	Komponen	Teori SAP	Praktik (DLHK Kabup	Ket

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

			aten Berau)			2010 memuat pos: pendapat an-LO dari kegiatan operasional, beban operasional, surplus/d efisit kegiatan non-operasional (jika ada), pos luar biasa (jika ada), dan surplus/d efisit-LO.	dan surplus /defisit-LO berdasarkan laporan tahun 2023.	Tahun 2010.	
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah dalam satu periode. Minimal memuat: pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/d efisit-LRA, pembiayaan, serta sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.	Menyajikan unsur pendapatan, belanja, dan surplus /defisit sesuai data dalam tabel laporan keuangan DLHK.	Sudah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010.					
					3	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan ini menyajikan informasi perubahan ekuitas dari awal hingga akhir tahun pelaporan . Harus mencakup: ekuitas awal, surplus/d efisit-LO, koreksi langsung terhadap ekuitas, dan	Menampilkan ekuitas awal, surplus /defisit, koreksi terhadap ekuitas, dan ekuitas akhir sesuai ketentuan.	Sudah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010.
2	Laporan Operasional (LO)	Laporan Operasional menurut PP No.71 Tahun	Menyajikan pendapatan-LO, beban,	Sudah sesuai dengan PP No.71					

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

		ekuitas akhir.					kondisi ekonomi makro, pencapaian target anggaran, informasi aset dan kewajiban berbasis akrual, serta informasi yang diperlukan untuk penyajian wajar.	ngkap informasi sesuai standar SAP dan menyusun laporan berbasis akrual.	
4	Neraca	Neraca menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, mencakup klasifikasi aset (lancar, tetap, tak berwujud), kewajiban (jangka pendek dan panjang), serta ekuitas sebagai selisih aset dan kewajiban.	Menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas. Telah mengklasifikasi aset dan kewajiban dengan benar, serta menyajikan perbandingan dengan tahun sebelumnya.	Sudah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010.					
5	Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)	CaLK memberikan penjelasan tambahan mengenai laporan keuangan utama. Mencakup kebijakan akuntansi,	Menyediakan penjelasan rinci atas LRA, LO, LPE, dan Neraca. Mengu	Sudah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010.					

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

### 1. Kesesuaian terhadap SAP Berbasis Akrual

Laporan keuangan yang disusun oleh DLHK Kabupaten Berau masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hal ini disebabkan karena DLHK masih merujuk pada ketentuan sebelumnya, yaitu PP Nomor 24 Tahun 2005, yang hanya mencakup lima dari tujuh komponen laporan keuangan utama. Laporan yang disajikan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dua komponen yang wajib disajikan dalam SAP berbasis akrual, yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK), belum tersedia dalam laporan DLHK. Dengan demikian, secara substansi, laporan keuangan DLHK belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pelaporan berbasis akrual yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh.

## 2. Faktor Penghambat Implementasi SAP Akrual

Penerapan SAP berbasis akrual di DLHK Kabupaten Berau menghadapi beberapa kendala teknis dan administratif. Salah satu hambatan

utama adalah ketidaktepatan dalam proses penganggaran dan penginputan data ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kesalahan tersebut berdampak langsung pada ketidaklengkapan elemen-elemen laporan keuangan yang disajikan. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta kurangnya pendampingan teknis dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual juga turut menjadi faktor penghambat. Akibatnya, DLHK belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai secara menyeluruh dengan standar pelaporan keuangan pemerintah yang berlaku saat ini.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa meskipun DLHK telah berupaya menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan, diperlukan perbaikan sistemik dalam hal pemahaman regulasi, peningkatan kompetensi teknis, serta optimalisasi sistem pelaporan berbasis teknologi informasi agar penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara utuh dan konsisten.

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau, peneliti memberikan beberapa saran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta kesesuaian dengan standar yang berlaku:

### 1. Penyusunan Laporan Keuangan yang Lebih Komprehensif

#### a. Penyusunan Panduan Teknis Internal

DLHK disarankan untuk mengembangkan pedoman atau buku panduan teknis internal yang secara jelas menguraikan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, khususnya Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang selama ini belum disusun. Panduan tersebut sebaiknya dilengkapi dengan ilustrasi kasus, format pelaporan, dan skenario praktis

yang sesuai dengan konteks operasional instansi.

#### b. Pendampingan Teknis oleh Tenaga Ahli

Disarankan agar DLHK bekerja sama dengan tenaga ahli atau konsultan di bidang akuntansi pemerintahan yang memiliki pengalaman dalam penerapan SAP berbasis akrual. Pendampingan ini akan membantu memberikan pemahaman menyeluruh dan praktik terbaik dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, relevan, dan sesuai regulasi.

### 2. Harmonisasi Regulasi dan Penguatan Sistem Informasi

#### a. Peninjauan Regulasi Internal Daerah

Perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan daerah maupun kebijakan internal yang mengatur pengelolaan keuangan, agar terdapat keselarasan dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Harmonisasi ini akan memastikan bahwa penerapan SAP berbasis akrual tidak terhambat

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

oleh ketentuan lokal yang sudah tidak sesuai.

## b. Optimalisasi Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi yang digunakan oleh DLHK, khususnya yang terintegrasi dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), perlu dikaji ulang dari sisi kapasitas, fungsionalitas, dan kelengkapan sarana penunjangnya. Diperlukan upaya pembaruan platform dan peningkatan infrastruktur pendukung agar seluruh proses pengelolaan, penginputan, dan penyajian data keuangan dapat dilakukan secara efisien, tepat waktu, serta menghasilkan laporan yang akurat dan lengkap.

Melalui pelaksanaan saran-saran ini, diharapkan DLHK Kabupaten Berau dapat memperbaiki sistem pelaporan keuangannya agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di sektor publik daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Isra' Ayat 35. 2020. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI, Jakarta. Bandung: Alfabeta.
- Bayu, M., Setyadi, D., Rochaida, E., & Paminto, A. 2016. *The Influence of Compensation and Organizational Culture and Work Conflict to Organizational Commitment and Cooperatives Management Performance in East Kalimantan-Indonesia*. *European Journal of Business and Management*, 8 (15).
- Bayu, M., & Fadelan, N. 2022. *Peran Pasar Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Di Pasar Senja Kampung Sei Bebanir Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau)*. *CAM JOURNAL: Change Agent For Management Journal*, 6 (2), 80-91.
- Bachtiar, Y., Laba, A. R., & Darmono, D. 2015. *The Influence Of Trading Day On The Values Of Companies Through Returns, Abnormal Stock Returns In The Indonesian Stock Exchange*. *IJABER*, Vol. 13, No. 5,(2015): 2853-2863, 13 (5), 2853-2863.
- Buchori, D., & Aisyah, S. R. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psak Nomor 16 Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Berau*. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 5(02), 89-100.
- Budhi Purwantoro Jati, 2019. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal WAHANA* Volume 21 (1).
- Darmono, D., Su'un, M., Jillbert, J., Ikawijaya, N., & Mursyidin, M. 2024. *Endogenous and Exogenous Factors Affecting Capital Structure: A Theoretical Review*. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- (1), 40-49.
- Erina Saudaryati dan Toton Da'I Permana, 2020. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Dinas Kehutanan Provisi Jawa Timur*. Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 5 (1).
- Fitriah & Dewi Sopiana. 2023. *Analisis Penyusutan Aktiva Tetap Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Berau*. Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal), 7 (2), 97-107.
- Fitriah & Devi Herviana. 2021. *Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Pmk Ri No.101/Pmk.010/2016 Pada Karyawan Cv Nusantara Tehnik Di Kabupaten Berau*. Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal), 5 (1), 33-49.
- Friska Langelo, et al. 2015. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung*. Jurnal EMBA Volume 3 (1).
- Haryadi (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Pustaka Cendekia.
- Hasanah, M., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Pustaka Cendekia.
- Hoesada, I. N., & Hendra, Y. (2015). *Akuntansi Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Langelo, J. H., & Mulyadi, P. (2015). *Akuntansi Keuangan Sektor Publik Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mentu, A. A., & Sondakh, D. M. (2016). *Akuntansi Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Meutia (2018). *Akuntansi Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Morissan, et al. (2017). *Metode Penelitian Survey*. Yogyakarta: Kencana.
- Muhammad Rajab, 2020. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari*. Journal of Economic and Business Volume 3 (2).
- Mulyadi (2017). *Akuntansi Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Muslimin, S. A. P., & Jafri, M. Sharia Family *Financial Planning Post Covid-19 Pandemic: Sharia Maqashid Approach*.
- Nurdin, et al. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Pramudiana, D. (2017). *Akuntansi Keuangan Sektor Publik Berbasis Akrual*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Rusmana, S., et al. (2017). *Akuntansi Keuangan Sektor Publik Berbasis Akrual*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sari, A. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- S. Rusmana, A. R. Chayono, dan A. D. Setyowati (2017). *Akuntansi Keuangan Sektor Publik Akrual*. Penerbit Yayasan Pustaka Utama.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Baru*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, S. 2022. *Financial*

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.09, No.01, April 2025, pp. 30– 49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- Performance on Improving The Quality of Human Resources in Higher Education.* Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 6 (03), 1-49.
- Syarifuddin, S. 2023. *Financial Policy and Employee Behavior in Higher Education; The Planned Behaviour Approach with MARS Model.* Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7 (03), 736-750.
- Yoyo Sudiaryo, et al. (2017). *Akuntansi Keuangan Sektor Publik.* Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Yuliani, M., Syarifuddin, S., Puwanto, S., Indriani, I., & Merlin, D. 2020. Riba Solutions Through Peer to Peer Lending Using Akad Qardhul Hasan. In *Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia.*
- Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Peraturan ini menjadi dasar hukum awal penetapan SAP di Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.